

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam tiap masyarakat, orang menggolongkan masing-masing dalam berbagai kategori, dari lapisan yang paling atas sampai yang paling bawah. Dengan demikian, terjadilah stratifikasi sosial. Ada masyarakat yang mempunyai stratifikasi sosial yang sangat ketat. Seorang lahir dalam golongan tertentu dan ia tak mungkin meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Keanggotaannya dalam suatu kategori merupakan faktor utama yang menentukan tinggi pendidikan yang dapat ditempuhnya, jabatan yang dapat didudukinya, dan sebagainya. Golongan yang ketat serupa ini biasanya disebut kasta (Nasution, 2009: 26).

Biasanya penggolongan sosial tidak seketat itu, akan tetapi fleksibel dengan batas-batas yang agak kabur dan senantiasa dapat mengalami perubahan. Konsep tentang golongan sosial bergantung pada cara seseorang menentukan golongan sosial itu. Adanya golongan sosial timbul karena adanya perbedaan status dikalangan anggota masyarakat. Untuk menentukan stratifikasi sosial dapat diikuti tiga metode, yaitu (Nasution, 2009:26); *Pertama*, metode obyektif. Stratifikasi ditentukan berdasarkan kriteria obyektif antara lain jumlah pendapatan, lama atau tinggi pendidikan, jenis pekerjaan. Biasanya keterangan demikian terkumpul sewaktu diadakan sensus. Menurut suatu penelitian di Amerika Serikat, dokter menempati kedudukan yang sangat tinggi sama dengan Gubernur negara bagian. Selain itu, profesor juga memiliki kedudukan yang sama dengan ilmuwan, anggota kongres, Dewan Perwakilan Rakyat. Guru sekolah

menduduki tempat yang lebih rendah dari kapten tentara, pemain orkes atau kontraktor, namun lebih tinggi daripada penyiar radio, masinis serta polisi. Dan yang paling rendah kedudukannya adalah tukang semir sepatu. *Kedua*, metode subyektif. Dalam metode ini, golongan sosial dirumuskan menurut pandangan anggota masyarakat menilai dirinya sendiri dalam hierarki kedudukan dalam masyarakat itu. Kepada mereka diajukan pertanyaan: “Menurut pendapat Saudara, termasuk golongan manakah Saudara di negara ini, golongan atas, golongan menengah, atau golongan rendah?”. Dalam penelitian tahun 1940 diperoleh golongan atas 6%, golongan menengah 88%, dan golongan rendah 6% (Nasution, 2009: 27). *Ketiga*, metode reputasi. Metode ini dikembangkan oleh W. Lloyd Warner cs. Dalam metode ini golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat itu. Kesulitan penggolongan obyektif dan subyektif ialah bahwa penggolongan itu sering tidak sesuai dengan tanggapan orang dalam kehidupan sehari-hari yang nyata tentang golongan sosial masing-masing. Oleh sebab itu W.L. Warner mengikuti suatu cara yang realistik yakni memberi kesempatan kepada orang-orang dalam masyarakat itu sendiri untuk menentukan golongan-golongan mana yang terdapat dalam masyarakat itu lalu mengidentifikasi anggota masing-masing golongan itu. Metode ini tidak menghiraukan dasar teoritis bagi penggolongan dan berusaha menentukan stratifikasi sosial seperti yang terdapat dalam interaksi yang nyata dikalangan penduduk dengan dasar pikiran bahwa merekalah yang sesungguhnya mengenal golongan itu dalam kenyataan. (Nasution, 2009: 28).

Peneliti lain menggunakan berbagai kriteria sosial ekonomi untuk membedakan berbagai golongan sosial seperti jabatan, jumlah, dan sumber pendapatan, tingkat pendidikan, agama, jenis dan luas rumah, lokasi rumah, keturunan, partisipasi dalam kegiatan organisasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan status sosial seseorang (Nasution, 2009:28). Tidak ada satu metode metode yang berlaku secara umum untuk menentukan golongan sosial dalam berbagai masyarakat di dunia ini. Mungkin juga tak ada kriteria yang sama yang berlaku bagi masyarakat yang berbeda-beda. Rumah yang bagus, pendapatan yang banyak bagi orang desa belum tentu dianggap rumah bagus atau pendapatan banyak di kota, dan sebagainya. Dalam masyarakat pedesaan sering sukar menentukan stratifikasi sosial yang jelas. Dalam masyarakat lain dapat dibedakan dua golongan atau lebih yang jelas perbedaannya. Mungkin juga akan diperoleh penggolongan sosial yang berbeda-beda dalam masyarakat yang sama bila digunakan kriteria yang berlainan.

Dalam berbagai studi, tingkat pendidikan tertinggi yang diperoleh seseorang digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya. Menurut penelitian memang terdapat korelasi yang tinggi antara kedudukan sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Walaupun tingkat sosial seseorang tidak dapat diramalkan sepenuhnya berdasarkan tingkat pendidikan, namun pendidikan tertinggi bertalian erat dengan kedudukan sosial yang tinggi (Nasution, 2009: 30).

Korelasi antara pendidikan dan golongan sosial antara lain terjadi oleh sebab anak golongan rendah kebanyakan tidak melanjutkan pelajarannya sampai

perguruan tinggi. Orang yang termasuk golongan sosial atas beraspirasi agar anaknya menyelesaikan pendidikan tinggi. Jabatan orangtua, jumlah dan sumber pendapatan, daerah tempat tinggal, tanggapan masing-masing tentang golongan sosialnya, dan lambang-lambang lain yang berkaitan dengan status sosial, berkaitan dengan tingkat pendidikan anak. Orang tua yang yang berkedudukan tinggi, yang telah bergelar akademis, mempunyai pendapatan besar serta bertempat tinggal di rumah mewah, merasa dirinya termasuk golongan sosial atas pasti akan mengusahakan agar anaknya masuk universitas dan memperoleh gelar akademis. Sebaliknya, anak yang orangtuanya buta huruf, mencari nafkah dengan cara mengumpulkan puntung rokok, tinggal di gubuk kecil pinggiran rel kereta api, tentu tak dapat diharapkan akan berusaha agar anaknya menikmati pendidikan tinggi.

Ada para pendidik yang menaruh kepercayaan besar sekali akan kekuasaan pendidikan dalam membentuk masyarakat baru. Karena itu setiap anak diharapkan memasuki sekolah dan dapat diberikan ide-ide baru tentang masyarakat yang lebih indah daripada yang sudah-sudah. Sekolah dapat merekonstruksi atau mengubah dan membentuk kembali masyarakat baru. Pendidikan berfungsi untuk menyampaikan, meneruskan atau mentransmisi kebudayaan, diantaranya nilai-nilai nenek moyang, kepada generasi muda. Dalam fungsi ini sekolah itu konservatif dan berusaha mempertahankan status quo demi kestabilan politik, kesatuan dan persatuan bangsa. Disamping itu sekolah juga turut mendidik generasi muda agar hidup dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan

yang cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini sekolah merupakan *agent of change*.

Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian terbuka kesempatan untuk meningkat ke golongan sosial yang lebih tinggi. Pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk beralih dari golongan yang satu ke golongan yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. Pada zaman dahulu keturunanlah yang menentukan status sosial seseorang yang sukar ditembus karena sistem golongan yang ketat. Tokoh-tokoh pendidikan banyak yang menaruh kepercayaan akan kemampuan pendidikan untuk memperbaiki nasib seseorang (Nasution, 2009: 38). Dengan memperluas dan meratakan pendidikan, diharapkan pula batas-batas antar golongan sosial dapat dikurangi atau dihapuskan. Pendidikan membuka kemungkinan adanya mobilitas sosial. Berkat pendidikan seorang dapat meningkat dalam status sosialnya. Pendidikan secara merata memberi kesamaan dasar pendidikan dan mengurangi perbedaan antara golongan tinggi dan rendah. Melalui pendidikan tiap warganegara dapat membaca surat kabar dan majalah yang sama, dapat memikirkan masalah-masalah politik, sosial, ekonomi yang sama (Nasution, 2009:39).

Walaupun terdapat mobilitas sosial secara sektoral, banyak pula golongan rendah yang tetap dianggap rendah. Namun kedudukan golongan rendah tidak statis akan tetapi dapat terus bergerak maju bila diberi pendidikan yang lebih layak. Banyak contoh-contoh yang dapat kita lihat disekitar tentang orang yang

meningkat dalam status sosialnya berkat pendidikan yang diperolehnya. Pada zaman dahulu orang yang menyelesaikan pelajaran di HIS, yaitu SD pada zaman Belanda mempunyai harapan menjadi pegawai dan mendapat kedudukan sosial yang terhormat. Apalagi kalau ia lulus MULO, AMS, atau perguruan tinggi maka besarlah kesempatannya untuk mendapat kedudukan yang baik dan dengan demikian masuk golongan sosial menengah atas (Nasution, 2009: 39).

Kini pendidikan SD bahkan SMA hampir tidak ada pengaruhnya dalam mobilitas sosial. Iklan mencari pesuruh kantor mengundang lamaran dari lulusan SMA, atau sebagian besar mendapat kesempatan menempuh pendidikan SMTA, maka ijazah SMA tidak ada artinya lagi dalam mencari kedudukan yang tinggi dan dengan demikian berpindah ke golongan sosial yang lebih tinggi. Kini pendidikan tinggi dianggap suatu syarat bagi mobilitas sosial. Bagi lulusan perguruan tinggi pun kini sudah bertambah sukar untuk memperoleh kedudukan yang empuk. Di samping ijazah perguruan tinggi ada lagi faktor-faktor lain yang membawa seseorang kepada kedudukan tinggi dalam pemerintahan atau dalam dunia usaha. Dapat kita pahami bahwa anak-anak golongan rendah lebih sukar mendapat kedudukan sebagai pimpinan perusahaan dibandingkan dengan anak pemimpin perusahaan itu sendiri. Hubungan pribadi, rekomendasi dari orang yang berkuasa disamping ijazah dan prestasi turut berperan untuk mendapat posisi yang tinggi. Mobilitas sosial bagi individu agak kompleks karena adanya macam-macam faktor yang membantu seorang meningkat dalam jenjang sosial. Juga guru-guru dapat mempengaruhi individu untuk mencapai kemajuan, bila mereka mendorong anak belajar agar mencapai prestasi yang tinggi. Guru itu sendiri dapat

menjadi model mobilitas sosial berkat usahanya belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga kedudukannya meningkat. Sebaliknya guru dapat menghalangi mobilitas sosial itu bila ia memandang rendah terhadap anak-anak dari golongan rendah dan tidak yakin akan kemampuan mereka. Mungkin juga guru tidak menyadari fungsi sekolah sebagai jalan bagi mobilitas sosial (Nasution, 2009: 40).

Sekolah dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan status anak-anak dari golongan rendah. Di sekolah mereka mempunyai hak yang sama atas pelajaran, mempelajari buku yang sama, mempunyai guru yang sama, bahkan berpakaian seragam yang sama dengan anak-anak dari golongan tinggi. Dengan prestasi yang tinggi dalam bidang akademis, olahraga, ekstrakurikuler, organisasi sekolah, dan lain-lain, mereka akan diterima dan oleh dihargai semua murid.

Dalam hubungan kelas mereka dapat mengikat tali persahabatan dengan anak-anak dari golongan sosial yang lebih tinggi yang mungkin dapat dilanjutkan dikemudian hari. Ia juga diharapkan meneruskan pelajarannya di perguruan tinggi. Akan tetapi bila ia hanya memiliki ijazah sekolah menengah, mungkin tingkat pendidikan itu kurang memadai dan tidak banyak artinya dalam meningkatkan kedudukan sosialnya sebagai orang dewasa dan justru akan mengalami frustrasi, kecuali bila ia bekerja keras didorong oleh tekad yang bulat untuk naik dalam jenjang sosial (Nasution, 2009:40).

1.2 Identifikasi Masalah

Ada beberapa hal yang harus dicermati dari hasil temuan penulis berikut ini:

1. Banyak anak-anak di Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang mestinya masih berada di bangku sekolah harus ikut meringankan beban keluarga dengan cara bekerja mengikuti keinginan orang tuanya hingga mengakibatkan putus sekolah.
2. Pemerintah Desa Cidahu sudah memberikan bantuan bagi keluarga ataupun anak yang mengalami putus sekolah agar melanjutkan pendidikan, namun rata-rata para siswa hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA kemudian mereka menjadi pekerja kasar maupun karyawan swasta. Sangat jarang ditemukan warga yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Mereka masih beranggapan bekerja lebih baik daripada harus terus mengenyam pendidikan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas yaitu tentang mobilitas sosial serta fungsi pendidikan dalam mengubah status sosial, khususnya di Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pendidikan masyarakat di desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan?
2. Faktor apa sajakah yang menentukan status sosial masyarakat di desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi pendidikan masyarakat di Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan status sosial masyarakat di Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka peneliti dapat menuliskan kegunaan penelitian sebagai berikut:

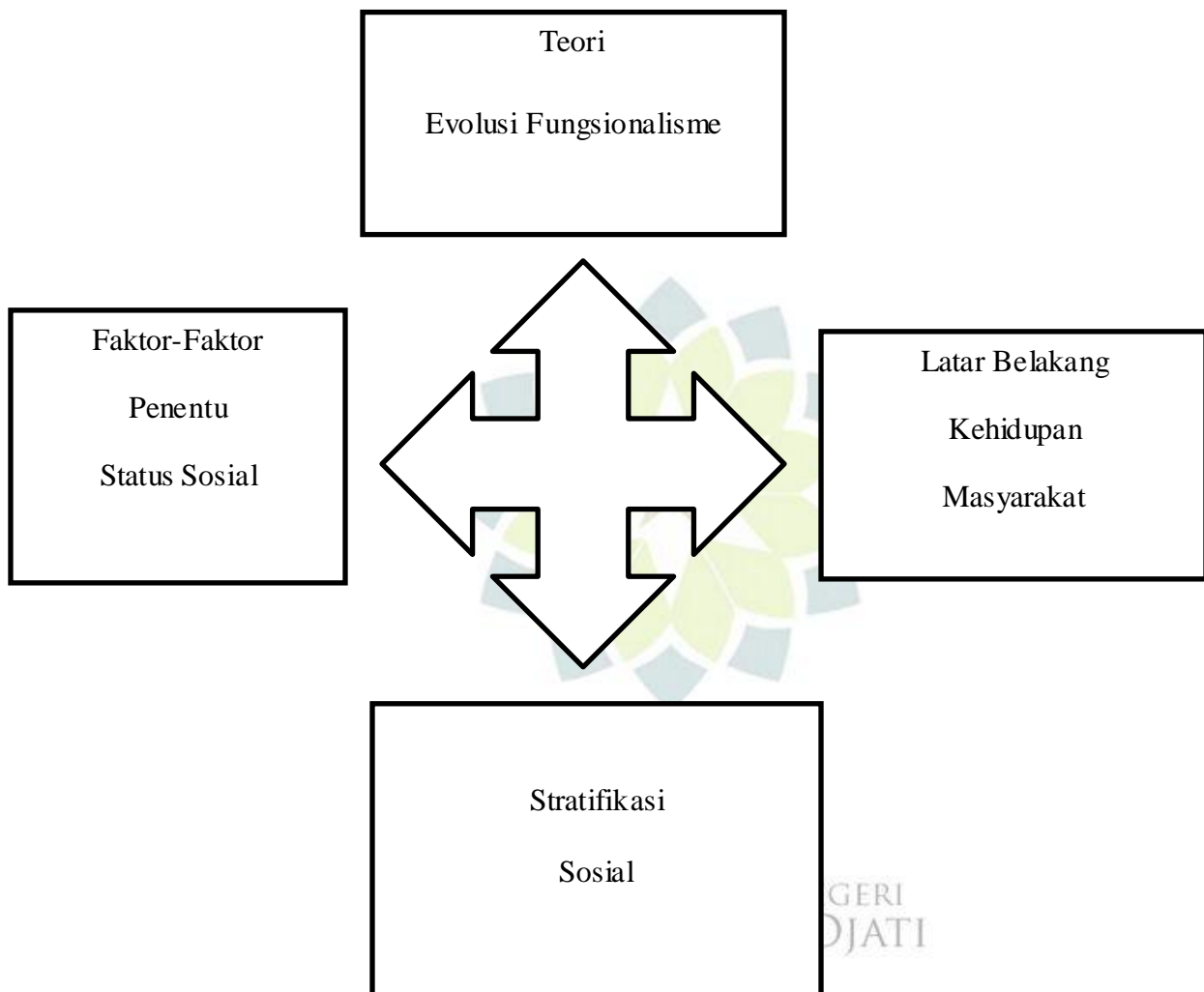
1. Kegunaan Teoritis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan konsep atau teori bagi pengembangan ilmu sosial. Terutama tentang Fungsi Pendidikan dalam Merubah Status Sosial yang menjadi pokok dalam kajian penelitian dan menjadi sebuah arahan positif terhadap masyarakat khususnya di wilayah Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan pemahaman mengenai keefektifan Fungsi Pendidikan dalam Merubah Status Sosial.

1.6 Kerangka Pemikiran



Stratifikasi sosial berasal dari kiasan yang menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat manusia pada umumnya. Menurut Petirim A. Sorokin, bahwa stratifikasi sosial (social stratification) adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (secara hierarkis). Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah (Abdulsyani, 2002: 82). Selanjutnya Sorokin menjelaskan bahwa dasar dan inti lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah karena tidak keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara anggota-anggota masyarakat. Lapisan-lapisan dalam masyarakat itu ada sejak manusia mengenal kehidupan bersama dalam masyarakat. Mula-mula lapisan-lapisan didasarkan pada pembedaan jenis kelamin, perbedaan antara pemimpin dengan yang dipimpin, pembagian kerja dan sebagainya. Semakin kompleks dan majunya pengetahuan serta teknologi dalam masyarakat, maka sistem lapisan-lapisan dalam masyarakat akan semakin kompleks pula.

Dalam kehidupan masyarakat biasanya selalu terdapat perbedaan status antara satu orang satu dengan yang lainnya, antara kelompok satu dengan yang lainnya. Ada yang mempunyai status sosial yang tinggi ada pula yang mempunyai status sosial lebih rendah dalam kehidupan masyarakat, sehingga kalau dilihat dari bentuknya seakan-akan status manusia dalam masyarakat itu berlapis-lapis dari atas ke bawah. Menurut konsep status sosial, bahwa di dalam sekelompok masyarakat tertentu pasti didalamnya terdapat beberapa orang yang lebih tinggi

daripada yang lainnya, begitu seterusnya bagi status-status lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (Abdulsyani, 2002: 83) selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai, maka hal itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Sesuatu yang dihargai didalam masyarakat itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, seperti tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam beragama, atau mungkin juga keturunan dari keluarga yang terhormat. Hasan Shadily mengatakan bahwa pada umumnya lapisan dalam masyarakat menunjukkan:

1. Keadaan senasib. Dengan paham ini kita mengenal lapisan yang terendah, yaitu lapisan pengemis, lapisan rakyat, dan sebagainya.
2. Persamaan batin ataupun kepandaian: lapisan terpelajar dan sebagainya.

Stratifikasi sosial tersebut merupakan pembedaan (diferensiasi) yang berhubungan dengan pengertian perbedaan tingkat, dimana anggota-anggota masyarakat berada di dalamnya. Menurut Pitirim A. Sorokin, (Abdulsyani, 2002: 84), bahwa sistem berlapis-lapis merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat. Bagi siapa saja yang memiliki sesuatu yang dihargai atau dibanggakan dalam jumlah yang lebih dari yang lainnya, maka ia akan dianggap mempunyai status yang lebih tinggi pula dalam masyarakat. Sebaliknya bagi mereka yang hanya mempunyai kuantitas sesuatu yang dibanggakan lebih sedikit, maka ia akan dianggap mempunyai status dalam masyarakat yang lebih rendah. Bagi seseorang yang memiliki status, baik yang rendah maupun yang tinggi,

sama-sama mempunyai sifat yang kumulatif; artinya bagi mereka yang mempunyai status ekonomi yang tinggi biasanya relatif mudah menduduki status-status sosial yang lain, seperti status sosial, politik, ataupun kehormatan tertentu dalam masyarakat. Begitu juga bagi mereka yang sedikit mempunyai status atau mereka yang tidak mempunyai sama sekali sesuatu untuk dibanggakan, biasanya mereka semakin sulit untuk dapat naik status, atau bahkan dapat dikatakan seseorang yang miskin cenderung semakin menjadi-jadi kemiskinannya.

Mengenai bentuk-bentuk konkret dari stratifikasi sosial dalam masyarakat, pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kelas ekonomi, politik, dan sistem nilai yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat tertentu. Orang yang mempunyai kebanggaan tertentu dibidang politik (kekuasaan), biasanya cenderung akan menduduki juga lapisan tertentu atas dasar nilai ekonomis. Mereka yang kaya biasanya mempunyai kecenderungan dapat menempati kedudukan-kedudukan penting dalam pemerintahan, sepanjang didukung oleh nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Orang yang kaya dan mempunyai kekuasaan tinggi cenderung mempunyai keluarga dan anak-anak yang cantik-cantik, lantaran orang-orang kelas bawah yang menyadari status sosialnya, tidak berani mendekati diri.

Sebagaimana telah disebutkan dimuka, bahwa secara sederhana terjadinya stratifikasi sosial karena adanya sesuatu yang dibanggakan oleh setiap orang atau kelompok dalam kehidupan masyarakat. Stratifikasi ini dapat terjadi pada setiap masyarakat; bahkan terjadi pada masyarakat yang paling sederhana sekalipun. Stratifikasi sosial dapat terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat, dapat pula

dibentuk dengan sengaja dalam rangka usaha manusia untuk mengejar cita-cita bersama (Abdulsyani, 2002: 85). Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya, seperti pembedaan umur, sifat keaslian adat-istiadat, atau mungkin harta benda karena warisan. Sedangkan stratifikasi yang dibentuk dengan sengaja, biasanya berhubungan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti pemerintahan, partai politik, angkatan bersenjata, dan bentuk perkumpulan lainnya.

Pembagian kekuasaan dan sebagainya itu sama halnya dengan sistem berlapis-lapis dalam masyarakat yang menyangkut pembagian uang, tanah, kehormatan, dan benda-benda ekonomis lainnya. Uang dapat dibagi secara bebas diantara anggota suatu organisasi berdasarkan kepangkatan atau ukuran senioritas tanpa merusak keutuhan organisasi yang bersangkutan. Malah apabila dalam suatu sistem pemerintahan, kekuasaan, dan wewenang tidak dibagi-bagi secara teratur sesuai dengan ukuran stratanya masing-masing, maka justru akan menimbulkan kekacauan-kekacauan yang tidak hanya berbahaya bagi keutuhan kehidupan masyarakat, akan tetapi berbahaya pula bagi suatu negara.

Menurut Soerjono Soekanto, (Abdulsyani, 2002: 85) semua manusia dapat dianggap sederajat, akan tetapi sesuai dengan kenyataan kehidupan dalam kelompok-kelompok sosial, halnya tidaklah demikian. Perbedaan atas lapisan-lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Ada beberapa ciri umum tentang faktor-faktor yang menentukan adanya stratifikasi sosial, yaitu antara lain:

1. Pemilikan atas kekayaan yang bernilai ekonomis dalam berbagai bentuk dan ukuran; artinya strata dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari nilai kekayaan seseorang dalam masyarakat.
2. Status atas dasar fungsi dalam pekerjaan, misalnya sebagai dokter, dosen, buruh, atau pekerja teknis dan sebagainya; semua ini sangat menentukan status seseorang dalam masyarakat.
3. Kesalahan seseorang dalam beragama; jika seseorang sungguh-sungguh penuh dengan ketulusan dalam menjalankan agamanya, maka status seseorang tadi akan dipandang lebih tinggi oleh masyarakat.
4. Status atas dasar keturunan, artinya keturunan dari orang yang dianggap terhormat (ningrat) merupakan ciri seseorang yang memiliki status tinggi dalam masyarakat.
5. Latar belakang rasial dan lamanya seseorang atau sekelompok orang tinggal pada suatu tempat. Pada umumnya seseorang sebagai pendiri suatu kampung atau perguruan tertentu, biasanya dianggap masyarakat sebagai orang yang berstatus tinggi, terhormat, dan disegani.
6. Status atas dasar jenis kelamin dan umur seseorang. Pada umumnya seseorang yang lebih tua umurnya akan dihormati dan dipandang tinggi statusnya dalam masyarakat. Begitu juga jenis kelamin; laki-laki pada umumnya dianggap lebih tinggi statusnya dalam keluarga dan masyarakat.

Dari beberapa ciri tersebut, kemudian berproses kedalam berbagai kondisi sosial masyarakat, misalnya perbedaan ciri biologis, etnis, ataupun ras, jika diantaranya terdapat kelompok yang mampu menguasai yang lainnya maka

terjadilah pembedaan status yang menunjuk pada eksistensi stratifikasi sosial. Bisa juga stratifikasi sosial bermula dari kondisi kelangkaan alokasi hak dan kesempatan, atau perbedaan posisi, kekuasaan dalam waktu yang sama; kesemuanya itu dapat mengakibatkan terbentuknya stratifikasi sosial (Abdulsyani,2002: 86). Sementara itu Robin Williams J.R (Abdulsyani, 2002: 86) menyebutkan pokok-pokok pedoman tentang proses terjadinya stratifikasi dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem stratifikasi sosial mungkin berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti yang khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi obyek penyelidikan.
2. Sistem stratifikasi sosial dapat dianalisis dalam rlingkup unsur-unsur sebagai berikut:
 - A. distribusi hak-hak istimewa yang obyektif seperti penghasilan, kekayaan, keselamatan, (kesehatan, laju angka kejahatan), wewenang, dan sebagainya.
 - B. Sistem pertentangan yang diciptakan masyarakat (prestise dan penghargaan)
 - C. kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapatkan berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan.
 - D. lambang-lambang status, seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi dan sebagainya.
 - E. mudah atau sukarnya bertukar status.

- F. solidaritas diantara individu-individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki status yang sama dalam sistem sosial di masyarakat:
- G. pola-pola interaksi (struktur clique, keanggotaan organisasi perkawinan dan sebagainya)
- H. kesamaan atau perbedaan sistem kepercayaan, sikap dan nilai-nilai
- I. kesadaran akan status masing-masing;
- J. aktivitas sebagai organ kolektif.

Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat ada yang bersifat terbuka dan ada yang bersifat tertutup. Stratifikasi sosial yang terbuka ada kemungkinan anggota masyarakat dapat untuk berpindah dari status satu ke status lainnya berdasarkan usaha-usaha tertentu. Misalnya seorang anak buruh tani dapat mengubah statusnya menjadi seorang dokter atau menjadi presiden sekalipun, apabila ia rajin belajar, berpolitik, dan bercita-cita untuk itu. Sebaliknya seorang anak presiden belum tentu dapat mencapai status presiden.

Dengan demikian berarti dalam sistem stratifikasi terbuka, setiap anggota masyarakat berhak dan mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kemampuan sendiri untuk naik status, atau mungkin juga justru stabil atau turun status sesuai dengan kualitas dan kuantitas usahanya sendiri (Abdulsyani, 2002: 88). Dalam sistem stratifikasi ini biasanya terdapat motivasi yang kuat pada setiap anggota masyarakat untuk berusaha memperbaiki status dan kesejahteraan hidupnya. Sistem stratifikasi terbuka lebih dinamis dan anggota-anggotanya cenderung mempunyai cita-cita yang tinggi. Keselamatan dari sistem stratifikasi ini, biasanya para anggota mengalami kehidupan yang tegang dan was-was,

lantaran didalam memperjuangkan cita-cita itu selalu bersaing dan berebut kesempatan untuk naik status yang jumlahnya relative terbatas, akibatnya anggota masyarakat banyak yang mengalami guncangan dan konflik antar sesama.

Pada sistem stratifikasi sosial yang tertutup terdapat pembatasan kemungkinan untuk pindah dari status satu ke status yang lain dalam masyarakat. Dalam sistem ini, satu-satunya kemungkinan untuk dapat masuk pada status tinggi dan terhormat dalam masyarakat adalah karena keturunan atau kelahiran. Hal ini jelas dapat diketahui dari kehidupan masyarakat yang mengagungkan kasta seperti di India misalnya; atau dalam kehidupan masyarakat yang masih menganut sistem feodalisme, atau dapat pula terjadi pada suatu masyarakat dimana statusnya ditentukan atas dasar ukuran perbedaan ras atau suku bangsa . Di Amerika Serikat juga terdapat perbedaan golongan kulit putih dengan golongan kulit hitam (negro) yang sebenarnya tidak berbeda dengan sistem apartheid di Afrika Selatan. Stratifikasi tertutup lebih bersifat statis, lebih-lebih bagi mereka yang termasuk dalam golongan bawah, jarang ada yang memiliki cita-cita tinggi. Dalam sistem ini status para anggota masyarakat sudah bersifat permanen dalam tingkatan sosial, disamping hubungannya dengan anggota masyarakat yang lain dibatasi oleh status yang dimilikinya. Sistem ini sering disebut sebagai sistem yang kaku dan ekstrim, oleh karena seorang yang dilahirkan sebagai penyimpang adat (lampung), ia tidak dapat ingkar dan meninggalkannya; kemampuan pribadi tidak diperhitungkan dalam menentukan tinggi rendahnya status. Dengan demikian dapat diketahui beberapa ciri dari sistem stratifikasi tertutup, yaitu sebagai berikut (Abdulsyani, 2002: 89) :

1. Status ditentukan atas dasar keturunan
2. Status yang diperoleh atas keturunan itu tidak dapat diubah dan berlaku seumur hidup; kecuali karena pelanggaran adat tertentu sehingga seorang pewaris status tadi dikeluarkan dari golongan adatnya
3. Hubungan antar sesamanya ditentukan atas dasar kesamaan status dengan mengikuti pola perilaku dan tata krama adat yang berlaku
4. Harga diri merupakan pandangan hidup

Sistem tertutup jelas terlihat pada masyarakat India yang berkasta, atau dalam masyarakat feodal, atau masyarakat dimana lapisannya tergantung pada perbedaan-perbedaan rasial (Soekanto, 1982: 256). Bentuk-bentuk lapisan masyarakat berbeda-beda dan banyak sekali. Lapisan-lapisan tersebut tetap ada, sekalipun dalam masyarakat kapitalis, demokratis, komunistis, dan lain sebagainya. Lapisan masyarakat tadi, mulai ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama di dalam suatu organisasi sosial (Soekanto, 1982: 252).



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG